



JOB

PROFIL PENGANGGURAN MALUKU UTARA AGUSTUS 2017



START
your
own
BUSINESS



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI MALUKU UTARA**



JOB



START
your
own BUSINESS



**PROFIL
PENGANGGURAN
MALUKU UTARA
AGUSTUS 2017**

PROFIL PENGANGGURAN MALUKU UTARA

AGUSTUS 2017

ISBN :
Nomor Publikasi : 82520.1806
Katalog BPS : 2304007.82
Ukuran Buku : B5 (17,6 x 25 cm)
Jumlah Halaman : vi + 29 halaman

Naskah:
Bidang Statistik Sosial

Penyunting:
Bidang Statistik Sosial

Gambar Kulit:
Bidang Statistik Sosial

Diterbitkan Oleh:
©BPS Provinsi Maluku Utara

Dicetak Oleh:
BPS Provinsi Maluku Utara

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

KATA PENGANTAR

Publikasi Profil Pengangguran Maluku Utara Agustus 2017 ini merupakan publikasi pertama yang berisi data dan informasi mengenai pengangguran di Maluku Utara pada Agustus 2017. Analisis mengenai pengangguran disajikan secara sederhana untuk membantu pengguna data memahami perkembangan dan fenomena pengangguran di Maluku Utara. Secara umum, karakteristik pengangguran yang dibahas dalam publikasi ini meliputi jenis kelamin, tingkat pendidikan, kelompok umur, dan daerah tempat tinggal.

Data yang digunakan dalam penyusunan publikasi ini diperoleh dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Agustus 2017. Selain itu, juga disertakan series data tahun sebelumnya untuk melengkapi analisis data.

Diharapkan dengan terbitnya publikasi ini, kebutuhan data pengangguran lebih mudah dipahami oleh semua kalangan pengguna data. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini disampaikan terima kasih. Saran dan kritik sangat kami hargai untuk perbaikan publikasi serupa di masa mendatang.

Ternate, April 2018
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Maluku Utara



Drs. Misfaruddin, M.Si.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI | iv |
| DAFTAR TABEL..... | v |
| DAFTAR GAMBAR | vi |
| BAB I Pendahuluan | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Tujuan..... | 3 |
| 1.3. Sistematika Penulisan..... | 3 |
| BAB II METODOLOGI..... | 4 |
| 2.1. Sumber Data..... | 4 |
| 2.2. Metode Analisis | 5 |
| 2.3. Konsep dan Definisi..... | 5 |
| BAB III PENGANGGURAN..... | 12 |
| 3.1. Pengangguran Menurut Provinsi..... | 12 |
| 3.2. Pengangguran Menurut Kabupaten/Kota | 15 |
| 3.3. Pengangguran Menurut Jenis Kelamin..... | 16 |
| 3.4. Pengangguran Menurut Kategori..... | 17 |
| 3.5. Pengangguran Menurut Pendidikan | 18 |
| 3.5. Pengangguran Menurut Kelompok Umur | 20 |
| 3.6. Pengangguran Menurut Wilayah Tempat Tinggal..... | 21 |
| BAB IV SEKILAS PEKERJA TIDAK PENUH..... | 23 |
| 4.1. Gambaran Umum Pekerja Tidak Penuh | 23 |
| 4.2. Pekerja Tidak Penuh Menurut Jenis Kelamin | 25 |
| 4.3. Pekerja Tidak Penuh Menurut Jenis Pendidikan | 26 |
| BAB V KESIMPULAN..... | 28 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 3.1. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi, 2016-2017 | 13 |
| Tabel 3.2. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, Agustus 2017 | 17 |
| Tabel 3.3. Pengangguran Menurut Kategori Pengangguran dan Jenis Kelamin, 2017..... | 18 |
| Tabel 3.4. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan yang Ditamatkan, 2017..... | 19 |
| Tabel 3.5. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kelompok Umur, 2017 | 21 |
| Tabel 4.1. Tingkat Pekerja Tidak Penuh Menurut Kabupaten/Kota, 2017 | 25 |
| Tabel 4.2. Tingkat Pekerja Tidak Penuh Menurut Tingkat Pendidikan, 2017 | 27 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 1. Diagram Ketenagakerjaan Menurut ICLS ke-13 | 5 |
| Gambar 2. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi, 2017 | 14 |
| Gambar 3. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di Maluku Utara, 2017 | 16 |
| Gambar 4. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Wilayah Tempat Tinggal | 22 |
| Gambar 5. Tingkat Pekerja Tidak Penuh di Maluku Utara, 2017 | 24 |
| Gambar 6. Tingkat Pekerja Tidak Penuh Menurut Jenis Kelamin, 2017 | 26 |

<https://malut.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengangguran merupakan salah satu isu penting ketenagakerjaan yang menjadi masalah serius di hampir setiap negara, baik negara berkembang maupun negara maju. Bahkan pengangguran menjadi salah satu bahan evaluasi kinerja pemerintah dalam memimpin negara. Tingkat pengangguran yang tinggi bisa diartikan sebagai kegagalan pemerintah dalam mengelola masyarakatnya.

Secara umum, pengangguran merupakan suatu kondisi dimana seseorang tidak mempunyai pekerjaan atau tidak mempunyai usaha dan sedang berusaha mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha. Sedangkan secara ekonomi, pengangguran merupakan efek dari ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. Keterbatasan lapangan kerja tidak mampu menyerap bertambahnya pencari kerja yang terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pengangguran diantaranya adalah:

- Pertumbuhan penduduk yang cepat. Meningkatnya jumlah angkatan kerja tidak diimbangi dengan peningkatan lapangan kerja;
- Pergeseran struktur perekonomian menjadi pola industri, dimana tenaga mesin lebih banyak digunakan ketimbang tenaga manusia;
- Kualifikasi yang dimiliki angkatan kerja tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta dunia kerja, baik dalam hal pendidikan maupun keterampilan;
- Informasi lapangan pekerjaan yang tidak tersampaikan kepada pencari kerja, karena keterbatasan akses media atau teknologi informasi;
- Ketidakstabilan kondisi ekonomi, politik, dan keamanan negara;
- Peraturan dan hukum adat yang menghambat iklim investasi;
- Rendahnya kemampuan dan kemauan berwirausaha; dan lainnya.

Pengangguran dapat menimbulkan berbagai masalah. Tidak hanya masalah dibidang ekonomi, tingginya angka pengangguran dapat menimbulkan masalah dibidang sosial seperti kemiskinan dan kerawanan sosial. Penduduk yang menganggur, secara ekonomi tidak produktif karena tidak mempunyai penghasilan. Ketidakmampuan dalam mendapatkan penghasilan berupa upah/gaji membuat orang yang menganggur kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Akibatnya, seringkali karena tidak memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai atau karena motif ekonomi memaksa mereka untuk melakukan tindak kriminal sebagai jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal tersebut secara langsung dapat mengganggu situasi dan stabilitas keamanan.

Selain pengangguran, permasalahan yang juga mulai muncul dewasa ini adalah pekerja tidak penuh, yaitu penduduk yang bekerja kurang dari jam kerja normal 35 jam dalam seminggu. Fenomena ini muncul sebagai dampak lapangan kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kualifikasi atau keinginan pencari kerja. Kebanyakan pekerja tidak penuh ini adalah mereka yang bekerja pada jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan tingkat pendidikannya dengan upah/gaji yang relatif rendah, sehingga produktivitasnya pun juga rendah.

Sebagai salah satu isu ketenagakerjaan yang sangat sensitif, sudah semestinya masalah pengangguran mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Dengan mengacu pada data pengangguran yang ada, dapat dirancang berbagai kebijakan yang berbasis ketenagakerjaan. Sayangnya, sejauh ini belum banyak publikasi yang secara khusus memaparkan secara rinci mengenai karakteristik pengangguran.

Melalui publikasi “Profil Pengangguran Maluku Utara Agustus 2017” ini, diharapkan dapat memaparkan karakteristik pengangguran menurut jenis kelamin, tingkat pendidikan, wilayah tempat tinggal, dan sebagainya. Dengan begitu, rujukan informasi mengenai pengangguran, khususnya yang ada di Provinsi Maluku Utara, dapat diperoleh dari publikasi ini.

1.2. Tujuan

Menyikapi isu pengangguran yang terus dibicarakan dan dicarikan solusi pemecahan, diperlukan sebuah informasi yang mampu menggambarkan kondisi sebenarnya dibalik karakteristik tingginya angka pengangguran. Secara umum tujuan penulisan publikasi ini adalah untuk menganalisis berbagai karakteristik pengangguran di Provinsi Maluku Utara.

Sedangkan tujuan khusus dari penulisan publikasi ini antara lain:

- a. Memberikan gambaran umum karakteristik pengangguran di Provinsi Maluku Utara tahun 2017;
- b. Memberikan gambaran umum karakteristik pekerja tidak penuh di Provinsi Maluku Utara tahun 2017.

1.3. Sistematika Penulisan

Penulisan publikasi Profil Pengangguran Maluku Utara Agustus 2017 ini disusun menjadi beberapa bab yang dijabarkan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang, tujuan, dan sistematika penulisan.

Bab II Metodologi, berisi sumber data, metode analisis, konsep dan definisi, dan bagan pengangguran.

Bab III Profil Pengangguran, berisi profil pengangguran di Provinsi Maluku Utara menurut karakteristiknya.

Bab IV Sekilas Pekerja Tidak Penuh, berisi informasi pekerja tidak penuh di Provinsi Maluku Utara menurut karakteristiknya.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan umum pengangguran dan pekerja tidak penuh di Provinsi Maluku Utara.

BAB II

METODOLOGI

2.1. Sumber Data

Sumber data makro mengenai ketenagakerjaan yang selama ini dianggap paling representatif berasal dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS). Survei yang dilakukan secara rutin oleh BPS ini memang dirancang khusus untuk menangkap fenomena dan gambaran umum ketenagakerjaan yang dapat diperbandingkan antar waktu dan wilayah karena dilakukan secara rutin dan menggunakan konsep-konsep internasional dari *International Labor Organization (ILO)* yang dipakai secara umum dalam pengumpulan data ketenagakerjaan.

Kegiatan pengumpulan data ketenagakerjaan melalui SAKERNAS pertama kali dilaksanakan tahun 1976. Sampai dengan saat ini, SAKERNAS mengalami berbagai perubahan baik dalam periode pencacahan maupun cakupan sampel wilayah dan rumah tangga. Tahun 1986 sampai dengan 1993 SAKERNAS dilaksanakan secara triwulanan, tahun 1994 sampai dengan 2001 secara tahunan setiap bulan Agustus. Pada tahun 2002 sampai dengan 2004 selain secara tahunan juga dilaksanakan secara triwulanan. Sedangkan tahun 2005 sampai dengan 2010 SAKERNAS dilakukan secara semesteran pada bulan Februari dan Agustus.

Dengan semakin mendesaknya tuntutan data ketenagakerjaan baik variasi, kontinuitas, kemutakhiran dan peningkatan akurasi data yang dihasilkan, maka pengumpulan data SAKERNAS periode 2011-2014 dilakukan secara triwulanan yaitu: bulan Februari (Triwulan I), Mei (Triwulan II), Agustus (Triwulan III), dan November (Triwulan IV) dengan penyajian datanya dirancang sampai tingkat provinsi. Untuk kegiatan SAKERNAS pada bulan Agustus (2011-2014) selain dengan sampel triwulanan juga terdapat sampel tambahan untuk memperoleh angka tahunan sebagai estimasi penyajian data sampai tingkat kabupaten/kota.

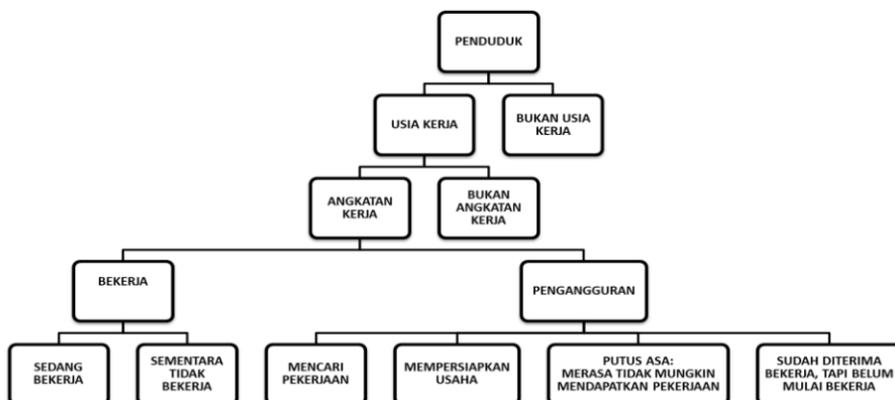
Mulai tahun 2015, SAKERNAS kembali dilaksanakan secara semesteran yaitu pada bulan Februari (Semester I) dan Agustus (Semester II) untuk mendapatkan estimasi hingga tingkat provinsi. Data dan informasi yang dikumpulkan melalui Sakernas dilakukan dengan wawancara langsung kepada rumah tangga sampel terpilih.

2.2. Metode Analisis

Metode Analisis dalam Profil Pengangguran Maluku Utara Agustus 2017 ini disajikan melalui analisis deskriptif sederhana dengan menampilkan data pada tabel dan grafik. Diharapkan dengan pemaparan yang sederhana ini dapat memudahkan pengguna data dalam memahami konsep dan definisi pengangguran, memperoleh gambaran kondisi umum pengangguran, mengidentifikasi indikator yang terkait pengangguran, dan membandingkan indikator tersebut baik antar periode maupun antar wilayah.

2.3. Konsep dan Definisi

Konsep baku yang digunakan dalam pengumpulan data ketenagakerjaan melalui SAKERNAS mengacu pada pendekatan *International Conference of Labour Statisticians (ICLS)* ke-13. Secara umum, konsep ketenagakerjaan dalam *ICLS* ke-13 tergambar dalam diagram ketenagakerjaan berikut:



Gambar 1. Diagram Ketenagakerjaan Menurut ICLS ke-13

Berdasarkan diagram ketenagakerjaan di atas, penduduk dikelompokkan menjadi penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja pun dibedakan lagi menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Dari diagram tersebut juga terlihat bahwa baik penduduk yang bekerja maupun pengangguran, sama-sama tergolong sebagai angkatan kerja. Pengukurannya didasarkan pada periode rujukan (*time reference*), yaitu kegiatan yang dilakukan selama seminggu yang lalu, yang berakhir sehari sebelum pencacahan.

Beberapa konsep definisi yang terkait dengan ketenagakerjaan berdasarkan ICLS ke-13 adalah sebagai berikut:

- a. **Penduduk Usia Kerja** adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih.
- b. **Penduduk yang termasuk angkatan kerja** adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
- c. **Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja** adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya.
- d. **Bekerja** adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan tidak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.
- e. **Punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja** adalah keadaan dari seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu tidak bekerja karena berbagai sebab, seperti: sakit, cuti, menunggu penenan, mogok dan sebagainya, termasuk mereka yang sudah diterima bekerja tetapi selama seminggu yang lalu belum mulai bekerja. Contoh:
 - Pekerja tetap/pegawai pemerintah/swasta yang sedang tidak masuk bekerja karena cuti, sakit, mogok, mangkir, mesin/peralatan perusahaan mengalami kerusakan dan sebagainya.

- Petani yang mengusahakan tanah pertanian dan sedang tidak bekerja karena alasan sakit atau menunggu pekerjaan berikutnya (menunggu panen atau menunggu hujan untuk menggarap sawah).
 - Orang-orang yang bekerja atas tanggungan/resiko sendiri dalam suatu bidang keahlian (pekerja profesional/mempunyai keahlian khusus), yang sedang tidak bekerja karena sakit, menunggu pesanan dan sebagainya
- f. **Pengangguran Terbuka** adalah angkatan kerja yang tidak bekerja/tidak mempunyai pekerjaan, yang mencakup angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
- Mulai tahun 2001, sesuai konsep ILO dalam “*An ILO Manual on Concepts and Methods*”, konsep pengangguran mengalami perubahan dengan menambahkan mereka yang sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja
- g. **Mencari pekerjaan** adalah kegiatan seseorang yang tidak bekerja dan pada saat survei orang tersebut sedang mencari pekerjaan, seperti:
- Yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.
 - Yang sudah pernah bekerja, karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan.
 - Yang bekerja atau mempunyai pekerjaan, tetapi karena sesuatu hal masih berusaha untuk mendapatkan pekerjaan lain.
- h. **Mempersiapkan Usaha** adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha yang “baru”, yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/karyawan/pegawai dibayar maupun tidak dibayar. Mempersiapkan suatu usaha yang dimaksud adalah apabila “tindakan nyata”, seperti mengumpulkan modal, perlengkapan/alat mencari lokasi/tempat, mengurus izin usaha dan sebagainya telah/sedang dilakukan.

Mempersiapkan usaha tidak termasuk yang baru merencanakan, berniat, dan baru mengikuti kursus/pelatihan dalam rangka membuka usaha. Mempersiapkan usaha nantinya cenderung sebagai berusaha sendiri (*own account worker*) atau sebagai berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar atau sebagai berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar.

- i. **Jumlah jam kerja seluruh pekerjaan** adalah jumlah jam kerja yang dilakukan oleh seseorang (tidak termasuk jam kerja istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal diluar pekerjaan) selama seminggu yang lalu. Bagi pedagang keliling, jumlah jam kerja dihitung mulai berangkat dari rumah sampai tiba kembali di rumah dikurangi waktu yang tidak merupakan jam kerja, seperti mampir ke rumah famili/kawan dan sebagainya. Untuk pembantu rumahtangga yang melakukan pekerjaan yang terus menerus didalam rumahtangga dihitung banyaknya jam kerja sehari rata-rata 12 jam.
- j. **Pekerja Tidak Penuh** adalah orang yang bekerja dibawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Setengah penganggur dibagi menjadi dua, yaitu:
 - **Setengah Penganggur** adalah orang yang bekerja dibawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan.
 - **Pekerja Paruh Waktu** adalah orang yang bekerja dibawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain (sebagian pihak menyebutnya sebagai pekerja paruh waktu/*part time worker*).
- k. **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** adalah perbandingan antara jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja dan biasanya dinyatakan dalam persen.
- l. **Sekolah** adalah kegiatan seseorang untuk bersekolah di sekolah formal, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi selama seminggu yang lalu sebelum pencacahan. *Tidak termasuk yang sedang libur sekolah.*

- m. **Mengurus rumah tangga** adalah kegiatan seseorang yang mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan upah, misalnya: ibu-ibu rumah tangga dan anaknya yang membantu mengurus rumah tangga. Sebaliknya pembantu rumah tangga yang mendapatkan upah walaupun pekerjaannya mengurus rumah tangga dianggap bekerja.
- n. **Kegiatan lainnya** adalah kegiatan seseorang selain disebut di atas, yakni mereka yang sudah pensiun, orang-orang yang cacat jasmani (buta, bisu dan sebagainya) yang tidak melakukan sesuatu pekerjaan seminggu yang lalu.
- o. **Pendidikan tertinggi yang ditamatkan** adalah tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu tingkatan sekolah dengan mendapatkan tanda tamat (ijazah).
- p. **Lapangan usaha** adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/tempat bekerja/perusahaan/kantor dimana seseorang bekerja. Klasifikasi baku yang digunakan dalam penggolongan lapangan pekerjaan/lapangan usaha adalah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2000. Dalam penyajian data terdapat sembilan kategori/sektor lapangan usaha, yaitu:
- Pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan.
 - Pertambangan dan penggalian.
 - Industri pengolahan.
 - Listrik, gas dan air.
 - Bangunan/konstruksi.
 - Pedagang besar, eceran, rumah makan dan hotel.
 - Angkutan, pergudangan dan komunikasi.
 - Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan.
 - Jasa kemasyarakatan
- q. **Jenis pekerjaan/jabatan** adalah macam pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau ditugaskan kepada seseorang yang sedang bekerja atau yang sementara tidak bekerja. Jenis pekerjaan pada publikasi ini, didasarkan atas

Klasifikasi Baku Jenis Pekerjaan Indonesia (KBJI) 2002 yang mengacu kepada *ISCO 88* dan dibagi dalam 8 golongan besar, yaitu:

- Tenaga profesional, teknisi dan yang sejenisnya.
- Tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan.
- Tenaga tata usaha dan tenaga yang sejenis.
- Tenaga usaha penjualan.
- Tenaga usaha jasa.
- Tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan, perikanan.
- Tenaga produksi, operator alat angkut, pekerja kasar.
- Lainnya.

r. **Status pekerjaan** adalah jenis kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Mulai tahun 2001 status pekerjaan dibedakan menjadi 7 kategori, yaitu:

- **Berusaha sendiri**, adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, yaitu dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar, termasuk yang sifat pekerjaannya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.
- **Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar**, adalah bekerja atau berusaha atas resiko sendiri, dan menggunakan buruh/pekerja tak dibayar dan atau buruh/pekerja tidak tetap, termasuk menggunakan pekerja keluarga.
- **Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar**, adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh/pekerja tetap yang dibayar.
- **Buruh/Karyawan/Pegawai**, adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang. Buruh yang tidak mempunyai majikan tetap, tidak digolongkan sebagai buruh/karyawan, tetapi sebagai pekerja

bebas. Seseorang dianggap memiliki majikan tetap jika memiliki 1 (satu) majikan (orang/rumah tangga) yang sama dalam sebulan terakhir, khusus pada sektor bangunan batasannya tiga bulan bekerja pada majikan yang sama. Apabila majikannya instansi/lembaga, boleh lebih dari satu.

- ***Pekerja bebas di pertanian***, adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir) di usaha pertanian baik berupa usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha pertanian meliputi: pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan perburuan, termasuk juga jasa pertanian.
- ***Pekerja bebas di nonpertanian*** adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir), di usaha non pertanian dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha non pertanian meliputi: usaha di sektor pertambangan, industri, listrik, gas dan air, sektor konstruksi/bangunan, sektor perdagangan, sektor angkutan, pergudangan dan komunikasi, sektor keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan, sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan.
- ***Pekerja keluarga/tak dibayar*** adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dengan tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang maupun barang. Pekerja tak dibayar dapat terdiri dari: Anggota rumah tangga dari orang yang dibantunya, seperti istri/anak yang membantu suaminya/ayahnya bekerja di sawah dan tidak dibayar atau Bukan anggota rumah tangga tetapi keluarga dari orang yang dibantunya, seperti famili yang membantu melayani penjualan di warung dan tidak dibayar.

BAB III

PROFIL PENGANGGURAN

Di hampir setiap negara, baik negara berkembang maupun negara maju sekalipun, pengangguran dianggap sebagai masalah krusial yang harus dicarikan kebijakan untuk menemukan solusinya. Tidak mengherankan karena masalah pengangguran akan membawa dampak yang luas lebih dari pada sekadar masalah ketidakmampuan seseorang dalam melakukan aktifitas ekonomi semata.

Seorang yang menganggur berarti tidak memiliki kemampuan dalam mendapatkan balas jasa berupa upah atau gaji dari sebuah aktifitas ekonomi, sehingga dapat dikatakan bahwa mereka termasuk tidak produktif. Karena tergolong sebagai kelompok yang tidak produktif, dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama kebutuhan dasar (*basic needs*), merekapun tidak kuasa untuk melakukannya. Bila sudah sampai pada tahap ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan maka seseorang termasuk sebagai kategori miskin.

Selain kemiskinan, dampak lain yang mungkin ditimbulkan dari pengangguran misalnya kerawanan sosial, tingkat kriminalitas, atau bahkan dapat dijadikan sebagai isu kepentingan politis. Begitu kompleksnya permasalahan pengangguran ini, sehingga diperlukan perhatian khusus dari pemerintah untuk memprioritaskan penurunan jumlah pengangguran disamping mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

3.1. Pengangguran Menurut Provinsi

Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengetahui kondisi pengangguran di suatu wilayah adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Nilai TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja yang mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

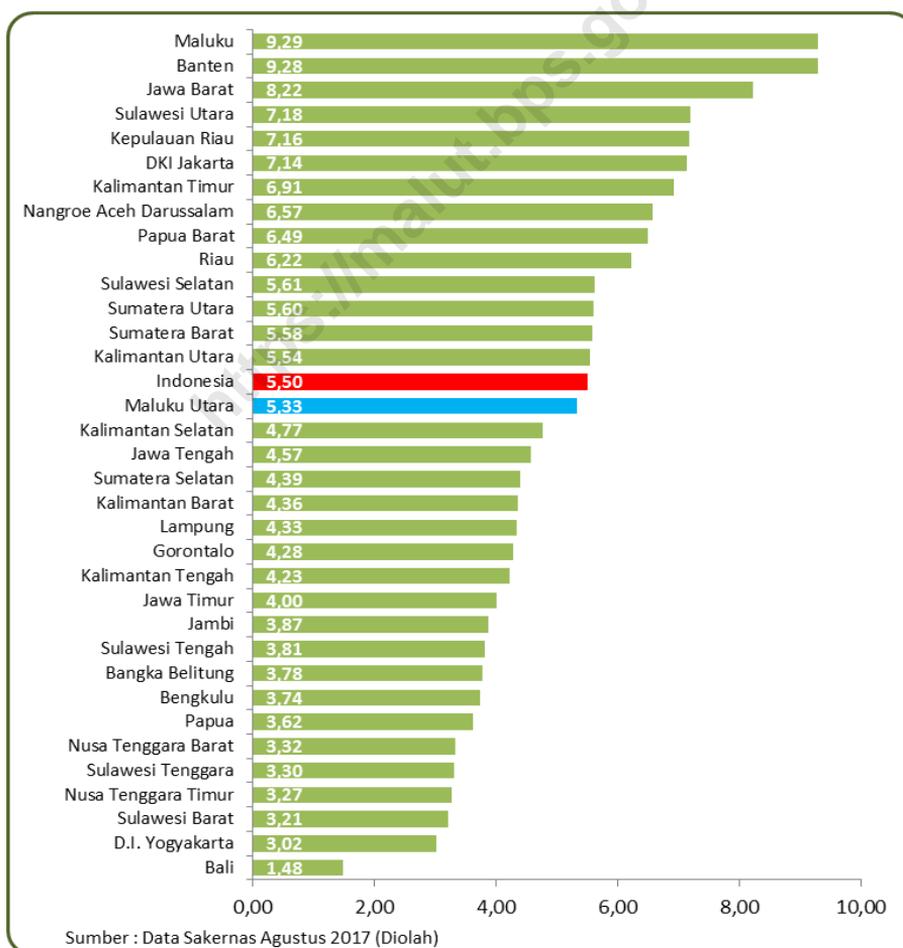
Tabel 3.1. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi, 2016-2017

| Provinsi | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | |
|-------------------------|------------------------------------|--------------|
| | Agustus 2016 | Agustus 2017 |
| (1) | (2) | (3) |
| Nangroe Aceh Darussalam | 7,57 | 6,57 |
| Sumatera Utara | 5,84 | 5,60 |
| Sumatera Barat | 5,09 | 5,58 |
| Riau | 7,43 | 6,22 |
| Jambi | 4,00 | 3,87 |
| Sumatera Selatan | 4,31 | 4,39 |
| Bengkulu | 3,30 | 3,74 |
| Lampung | 4,62 | 4,33 |
| Bangka Belitung | 2,60 | 3,78 |
| Kepulauan Riau | 7,69 | 7,16 |
| DKI Jakarta | 6,12 | 7,14 |
| Jawa Barat | 8,89 | 8,22 |
| Jawa Tengah | 4,63 | 4,57 |
| D.I. Yogyakarta | 2,72 | 3,02 |
| Jawa Timur | 4,21 | 4,00 |
| Banten | 8,92 | 9,28 |
| Bali | 1,89 | 1,48 |
| Nusa Tenggara Barat | 3,94 | 3,32 |
| Nusa Tenggara Timur | 3,25 | 3,27 |
| Kalimantan Barat | 4,23 | 4,36 |
| Kalimantan Tengah | 4,82 | 4,23 |
| Kalimantan Selatan | 5,45 | 4,77 |
| Kalimantan Timur | 7,95 | 6,91 |
| Kalimantan Utara | 5,23 | 5,54 |
| Sulawesi Utara | 6,18 | 7,18 |
| Sulawesi Tengah | 3,29 | 3,81 |
| Sulawesi Selatan | 4,80 | 5,61 |
| Sulawesi Tenggara | 2,72 | 3,30 |
| Gorontalo | 2,76 | 4,28 |
| Sulawesi Barat | 3,33 | 3,21 |
| Maluku | 7,05 | 9,29 |
| Maluku Utara | 4,01 | 5,33 |
| Papua Barat | 7,46 | 6,49 |
| Papua | 3,35 | 3,62 |
| Indonesia | 5,61 | 5,50 |

Sumber : Data Sakernas Agustus 2016-2017 (Diolah)

TPT Maluku Utara pada Agustus 2017 adalah sebesar 5,33 persen yang berarti bahwa dari 100 penduduk angkatan kerja terdapat 5 orang penganggur. Dibanding kondisi yang sama pada tahun sebelumnya, TPT Maluku Utara pada Agustus 2016 sebesar 4,01 persen. Terdapat kenaikan sebesar 1,32 poin persen selama rentang setahun terakhir.

Secara nasional, TPT Maluku Utara masih berada di bawah TPT nasional, baik pada Agustus 2016 maupun Agustus 2017. TPT nasional pada Agustus 2016 adalah sebesar 5,61 persen. Kemudian turun menjadi 5,50 persen pada Agustus 2017. Dapat diartikan bahwa sampai dengan Agustus 2017, terdapat sekitar 6 orang penganggur dari tiap 100 orang penduduk angkatan kerja di Indonesia.



Gambar 2. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi, 2017

Berdasarkan Gambar 2, terlihat distribusi TPT menurut provinsi di Indonesia memiliki rentang yang cukup panjang, yaitu sekitar 7,81 poin. Provinsi Bali memiliki TPT paling rendah, yaitu sebesar 1,48 persen. Diikuti oleh Provinsi D.I. Yogyakarta pada posisi terendah kedua dengan TPT sebesar 3,02 persen. Sedangkan Provinsi Maluku memiliki TPT tinggi, yaitu sebesar 9,29 persen. Diikuti oleh Provinsi Banten pada posisi tertinggi kedua dengan TPT sebesar 9,28 persen.

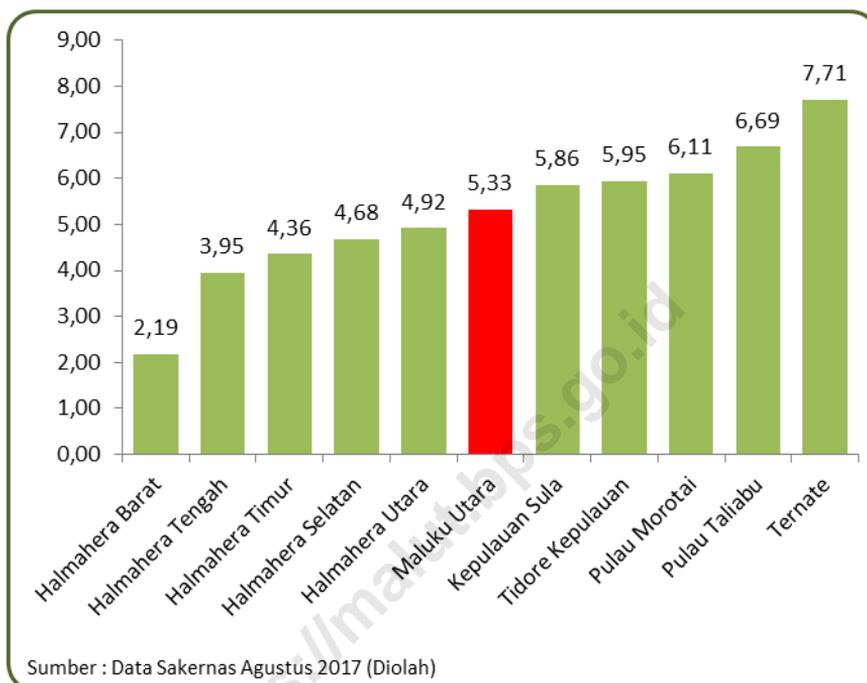
Rentang yang cukup lebar antara kontributor TPT tertinggi dan terendah dan bervariasinya nilai TPT di masing-masing provinsi menandakan bahwa setiap daerah mempunyai kebijakan-kebijakan dan strategi yang berbeda dalam menangani masalah ketenagakerjaan, terlebih khusus pada masalah pengangguran. Terutama pada daerah-daerah yang mempunyai potensi jumlah angkatan kerja yang besar dan laju pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi. Dengan besarnya jumlah angkatan kerja otomatis jumlah lapangan pekerjaan yang harus disediakan oleh pemerintah maupun swasta juga harus sebanding. Dengan kata lain, laju pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi harus diimbangi dengan laju pertumbuhan kesempatan kerja yang tinggi.

3.2. Pengangguran Menurut Kabupaten/Kota

Distribusi TPT kabupaten/kota di Maluku Utara cukup bervariasi dengan TPT paling rendah tercatat di Kabupaten Halmahera Barat (2,19 persen) dan TPT paling tinggi tercatat di Kota Ternate (7,71 persen). Sementara kabupaten/kota lainnya memiliki TPT pada kisaran 3,95 persen sampai dengan 6,69 persen. Secara umum, terdapat lima kabupaten/kota yang memiliki angka TPT lebih tinggi daripada angka provinsi.

Kota Ternate sebagai pusat perekonomian di Maluku Utara memiliki daya tarik yang cukup besar bagi para pencari kerja. Jumlah angkatan kerja di Kota Ternate cukup besar, bahkan yang terbesar dibanding kabupaten/kota lainnya. Dibutuhkan lapangan usaha yang cukup memadai untuk bisa menampung banyaknya pencari kerja. Kebutuhan akan lapangan kerja ini, jika tidak terpenuhi

akan berdampak pada besarnya jumlah pengangguran terbuka. Berdasarkan nilai TPT Kota Ternate pada Agustus 2017 terlihat bahwa masih terdapat kesenjangan antara lapangan kerja yang tersedia dengan penduduk yang mencari kerja.



Gambar 3. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di Maluku Utara, 2017

3.3. Pengangguran Menurut Jenis Kelamin

Pada umumnya orang yang bertanggung jawab menjadi pemberi nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam sebuah keluarga adalah kaum laki-laki. Namun seiring perkembangan zaman, ditambah lagi dengan semakin beragamnya kebutuhan hidup masing-masing individu, serta tuntutan kesetaraan gender dan emansipasi wanita, telah banyak kaum wanita yang aktif bekerja atau berusaha. Meskipun demikian, perlu disadari bahwa tidak semua pekerjaan bisa dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan.

Pengangguran di Maluku Utara lebih banyak disumbang oleh penduduk perempuan. Dari sepuluh kabupaten/kota di Maluku Utara, sembilan diantaranya mempunyai TPT perempuan yang lebih tinggi dari TPT laki-laki. Bahkan di

Kabupaten Halmahera Tengah, TPT perempuan sebesar enam kali TPT laki-laki. Dengan kata lain, penduduk laki-laki di Kabupaten Halmahera Tengah lebih banyak yang bekerja daripada penduduk perempuan.

Kabupaten Halmahera Timur adalah satu-satunya kabupaten di Maluku Utara yang memiliki TPT laki-laki lebih besar dibanding TPT perempuan. TPT laki-laki di kabupaten ini tercatat sebesar 5,21 persen. hampir dua kali TPT perempuan yang sebesar 2,73 persen. berkebalikan dengan kondisi di kabupaten/kota lain, di Kabupaten Halmahera Timur lebih banyak penduduk perempuan yang bekerja atau berusaha.

Tabel 3.2. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, Agustus 2017

| Kabupaten | Laki-laki | Perempuan | Total |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Halmahera Barat | 1,64 | 3,07 | 2,19 |
| Halmahera Tengah | 1,36 | 8,62 | 3,95 |
| Kepulauan Sula | 5,77 | 6,02 | 5,86 |
| Halmahera Selatan | 3,09 | 7,70 | 4,68 |
| Halmahera Utara | 4,92 | 4,93 | 4,92 |
| Halmahera Timur | 5,21 | 2,73 | 4,36 |
| Pulau Morotai | 4,48 | 8,75 | 6,11 |
| Pulau Taliabu | 3,98 | 11,44 | 6,69 |
| Ternate | 5,40 | 11,48 | 7,71 |
| Tidore Kepulauan | 4,67 | 8,06 | 5,95 |
| Maluku Utara | 4,20 | 7,37 | 5,33 |

Sumber : Data Sakernas Agustus 2017 (Diolah)

3.4. Pengangguran Menurut Kategori

Mulai tahun 2001, konsep pengangguran terbuka mengalami perubahan. Semula yang termasuk sebagai pengangguran adalah para pencari kerja dan mereka yang sedang mempersiapkan usaha. Dengan konsep baru ada tambahan kriteria yang termasuk sebagai pengangguran terbuka, yaitu merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan/putus asa dan sudah mempunyai pekerjaan/usaha tetapi belum mulai bekerja .

Berdasarkan Tabel 3.3., pengangguran di Maluku Utara didominasi oleh para pencari kerja, yaitu sebesar 77,50 persen. Hal yang menarik dari pengangguran di Maluku Utara jika dilihat menurut kategorinya adalah tingginya angka pengangguran putus asa (merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan) yang mencapai 14,08 persen.

Selain itu, pengangguran yang sedang mempersiapkan usaha juga sangat rendah nilainya, yaitu 1,38 persen. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar pengangguran di Maluku Utara lebih terfokus untuk mencari pekerjaan ketimbang mempersiapkan usaha. Ini menjadi sebuah tantangan bagi pemerintah daerah untuk membuat program pembinaan wirausaha kepada masyarakat Maluku Utara khususnya yang masih menganggur. Tujuannya agar para penganggur memiliki kemampuan dan kemauan untuk berwirausaha agar tidak hanya berharap mendapatkan pekerjaan tapi justru menciptakan lapangan pekerjaan.

Tabel 3.3. Pengangguran Menurut Kategori Pengangguran dan Jenis Kelamin, 2017

| Jenis Kelamin | Kategori Pengangguran | | | | Total |
|---------------|-----------------------|---------------------|---|--|---------------|
| | Mencari Pekerjaan | Mempersiapkan Usaha | Putus Asa (Merasa Tidak Mungkin Mendapat Pekerjaan) | Sudah Diterima/ Punya Usaha tapi Belum Mulai Bekerja | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Laki-laki | 76,58 | - | 13,31 | 10,11 | 100,00 |
| Perempuan | 78,46 | 2,81 | 14,87 | 3,87 | 100,00 |
| Total | 77,50 | 1,38 | 14,08 | 7,03 | 100,00 |

Sumber : Data Sakernas Agustus 2017 (Diolah)

3.5. Pengangguran Menurut Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam persaingan pasar kerja. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja dianggap akan mempengaruhi dan meningkatkan produktivitas kerjanya. Untuk itu analisis mengenai pengangguran menurut tingkat pendidikan dapat

digunakan sebagai indikator ketidakmampuan pasar kerja memanfaatkan *supply* angkatan kerja yang ditawarkan.

Dalam pasar tenaga kerja, semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh seseorang maka semakin baik kemampuannya dalam bersaing dan berkompetisi. Semakin tinggi pula kualifikasi dan daya tawarnya dalam dunia kerja. Namun kondisi sesungguhnya yang terjadi di Indonesia umumnya dan di Maluku Utara khususnya berbeda dengan teori tersebut. Pengangguran justru didominasi oleh angkatan kerja yang mempunyai tingkat pendidikan menengah dan tinggi. Kelompok ini biasa disebut dengan istilah pengangguran terdidik.

Tabel 3.4. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan yang Ditamatkan, 2017

| Tingkat Pendidikan | Angkatan Kerja (000 Jiwa) | Pengangguran (000 Jiwa) | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) |
|---------------------|------------------------------|----------------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Pendidikan Dasar | 282,8 | 7,9 | 2,78 |
| Pendidikan Menengah | 152,2 | 14,3 | 9,37 |
| Pendidikan Tinggi | 81,2 | 5,4 | 6,66 |
| Total | 516,2 | 27,5 | 5,33 |

Sumber : Data Sakernas Agustus 2017 (Diolah)

Fenomena pengangguran terdidik di Maluku Utara dapat dilihat pada Tabel 3.4. di atas. TPT terbesar berada pada penduduk dengan pendidikan menengah yang merupakan gabungan dari lulusan SMA Umum, dan SMA Kejuruan, yaitu sebesar 9,37 persen. Tidak berpaut jauh, TPT terbesar kedua ada pada penduduk dengan pendidikan tinggi yang terdiri dari lulusan Diploma dan Universitas, yaitu sebesar 6,66 persen. Sementara TPT pada kelompok penduduk berpendidikan dasar (SMP kebawah) hanya sebesar 2,78 persen.

Tingginya TPT pada kelompok pendidikan menengah dan tinggi ini bisa disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya:

- a. Tenaga kerja terdidik yang baru menyelesaikan pendidikan tinggi berjumlah besar dan muncul dalam waktu yang bersamaan. Selain itu, mereka juga dianggap belum memiliki pengalaman dalam dunia kerja.
- b. Kualitas lulusan yang dihasilkan oleh institusi pendidikan yang ada masih rendah, sehingga tidak terserap di pasar kerja karena tidak memenuhi standar kualifikasi yang ditetapkan oleh pasar kerja.
- c. Melimpahnya lulusan pada jurusan pendidikan tertentu sehingga terjadi penumpukan lulusan pada jurusan pendidikan tersebut yang tidak semuanya bisa terserap oleh pasar kerja.
- d. Tenaga kerja terdidik biasanya selektif dan terkesan pilih-pilih pekerjaan dalam pasar kerja. Preferensi pekerjaan yang biasanya diminati oleh para tenaga kerja terdidik adalah pekerjaan kantoran dengan status sebagai karyawan atau pegawai dimana balas jasa yang diterima berupa upah/gaji yang rutin atau tetap.

3.5. Pengangguran Menurut Kelompok Umur

Dengan menggunakan batas bawah 15 tahun pada kriteria seseorang dapat dikatakan sebagai *economically active population* dan tanpa batas atas penduduk usia kerja diperoleh persentase pengangguran terbuka menurut kelompok umur lima tahunan.

Berdasarkan struktur umur, penduduk Maluku Utara tergolong dalam struktur umur muda dimana proporsi penduduk muda lebih besar dari penduduk tua. Seiring dengan proporsi penduduk muda yang besar, jumlah penduduk usia kerja yang siap untuk masuk sebagai angkatan kerja juga cukup besar.

Potensi angkatan kerja muda dengan jumlah yang besar dapat membawa konsekuensi positif ataupun negatif. Bila didukung oleh tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai maka angkatan kerja tersebut dapat menjadi sebuah keuntungan dengan tersalurkannya produktivitas tenaga kerja tersebut dalam pasar kerja. Sebaliknya, jika jumlah lapangan pekerjaan dalam pasar kerja tidak dapat menampung para pencari kerja, maka jumlah pengangguran terbuka yang besar dapat membawa permasalahan yang kompleks.

Pengangguran terbuka di Maluku Utara terpusat pada penduduk usia muda, terutama pada dua kelompok umur muda (15-19 dan 20-24). Bahkan jika dibandingkan dengan kelompok umur yang lain, TPT pada dua kelompok umur ini tergolong sangat tinggi, yaitu 21,59 persen pada kelompok umur 15-19 tahun dan 20,03 persen pada kelompok umur 20-24 tahun.

Tingginya angka pengangguran pada dua kelompok umur ini menjadi sebuah indikasi ketidaksiapan penduduk muda Maluku Utara untuk masuk ke dunia kerja. Tingkat pendidikan yang rendah, belum memiliki pengalaman kerja, serta ketersediaan lapangan kerja yang sesuai kualifikasi kemungkinan menjadi faktor utama tingginya angka pengangguran pada kelompok umur ini.

Tabel 3.5. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kelompok Umur, 2017

| Kelompok Umur | Angkatan Kerja (000 Jiwa) | Pengangguran (000 Jiwa) | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) |
|---------------|------------------------------|----------------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 15 - 19 | 28,4 | 6,1 | 21,59 |
| 20 - 24 | 47,6 | 9,5 | 20,03 |
| 25 - 29 | 68,3 | 5,2 | 7,66 |
| 30 - 34 | 79,3 | 1,8 | 2,26 |
| 35 - 39 | 77,7 | 1,6 | 2,10 |
| 40 - 44 | 65,8 | 1,2 | 1,76 |
| 45 - 49 | 49,5 | 0,9 | 1,84 |
| 50 - 54 | 37,9 | 0,0 | 0,00 |
| 55 - 59 | 28,4 | 0,8 | 2,74 |
| 60 + | 33,5 | 0,4 | 1,07 |
| Total | 516,2 | 27,5 | 5,33 |

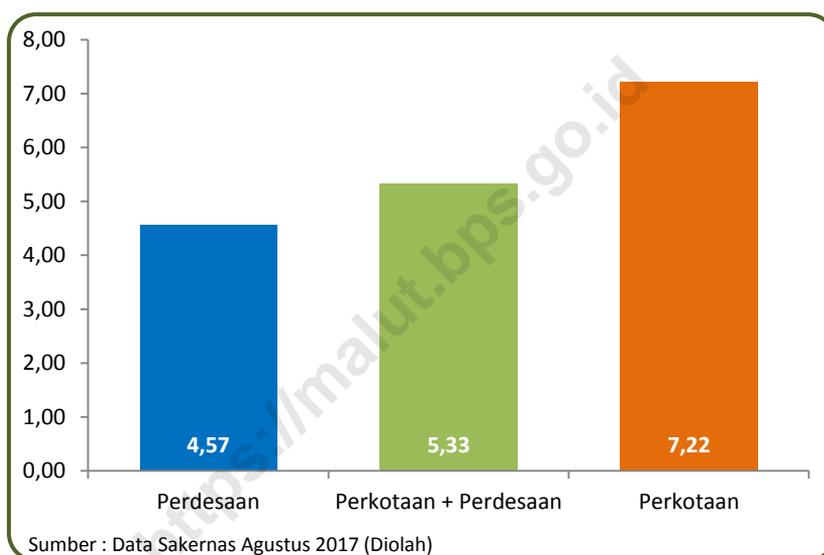
Sumber : Data Sakernas Agustus 2017 (Diolah)

3.6. Pengangguran Menurut Wilayah Tempat Tinggal

Umumnya tingkat pengangguran lebih tinggi terjadi di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah pedesaan. Fenomena tersebut juga berlaku di Provinsi Maluku Utara. TPT di wilayah perkotaan lebih tinggi daripada TPT di wilayah pedesaan. Dapat dikatakan bahwa tingginya angka TPT di wilayah

perkotaan memberikan pengaruh pada tingginya angka TPT Provinsi Maluku Utara, sehingga prioritas penurunan angka TPT sebaiknya lebih difokuskan pada daerah perkotaan.

Tingkat Pengangguran Terbuka wilayah perkotaan di Provinsi Maluku Utara sesuai pada Gambar 4 adalah sebesar 7,22 persen pada periode Agustus 2017. Artinya dari 100 orang angkatan kerja 7 orang diantaranya tergolong pengangguran.



Gambar 4. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Wilayah Tempat Tinggal

BAB IV

SEKILAS PEKERJA TIDAK PENUH

Selain pengangguran, permasalahan ketenagakerjaan yang juga banyak dihadapi sekarang ini adalah pekerja tidak penuh. Pekerja tidak penuh adalah penduduk yang bekerja namun jam kerjanya dibawah jam kerja normal yang ditetapkan 35 jam per minggu. Biasanya kelompok penduduk ini identik dengan tenaga kerja dengan tingkat pendapatan yang rendah.

Kebanyakan para pekerja yang berstatus sebagai pekerja paruh waktu ini menjalani pekerjaannya tersebut karena keadaan atau karena keterampilan dan keahlian yang dimiliki hanya sesuai untuk pekerjaan tersebut. Tidak jarang pula mereka menerima pekerjaan yang sejatinya bukan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikan yang dimilikinya. Secara umum, pekerja paruh waktu banyak yang bekerja secara harian dan menerima upah menurut jumlah jam kerja atau hari kerja, atau menurut jumlah barang/jasa yang diselesaikan.

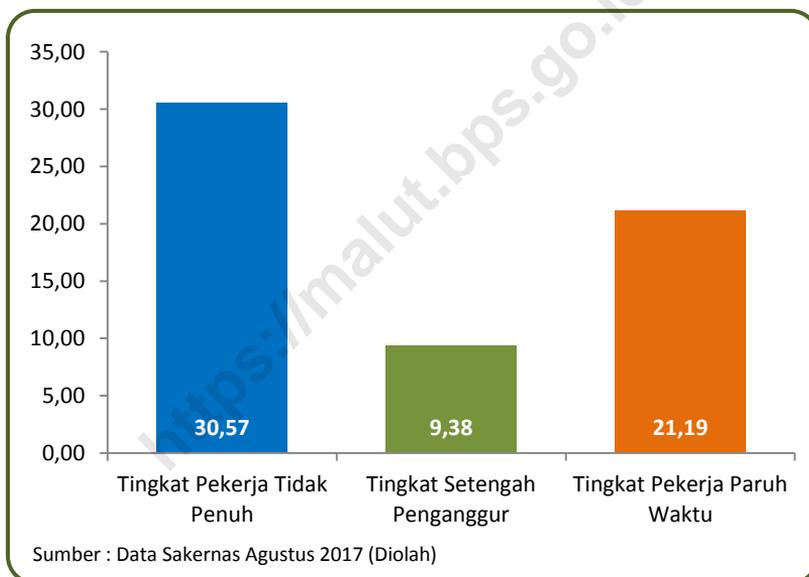
4.1. Gambaran Umum Pekerja Tidak Penuh

Menurut konsep BPS, pekerja tidak penuh dibagi menjadi dua kelompok, yaitu setengah penganggur dan pekerja paruh waktu. Baik setengah penganggur maupun pekerja paruh waktu, sama-sama memiliki jam kerja kurang dari 35 jam per minggu. Yang membedakan adalah, seseorang dikatakan setengah penganggur jika masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan. Sedangkan pekerja paruh waktu, meski jam kerjanya kurang dari 35 jam, tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan.

Dalam menganalisis pekerja tidak penuh dapat menggunakan indikator Tingkat Pekerja Tidak Penuh, seperti pada analisis pengangguran dengan menggunakan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Ukuran ini dipakai untuk memudahkan dalam mengeinterpretasikan banyaknya orang yang tergolong pekerja tidak penuh terhadap seratus orang angkatan kerja.

Berdasarkan penggolongan pekerja tidak penuh menjadi setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu, indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kedua jenis pekerja tidak penuh itu adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat Setengah Penganggur (TSP) adalah persentase penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu yang masih mencari pekerjaan atau bersedia menerima pekerjaan lain terhadap angkatan kerja.
- b. Tingkat Pekerja Paruh Waktu (TPPW) adalah persentase penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu yang tidak lagi mencari pekerjaan dan tidak bersedia menerima pekerjaan lain terhadap angkatan kerja.



Gambar 5. Tingkat Pekerja Tidak Penuh di Maluku Utara, 2017

Berdasarkan Gambar 5. Tingkat Pekerja Tidak Penuh (TPTP) Maluku Utara pada tahun 2017 adalah sebesar 30,57 persen. Nilai tersebut menggambarkan dari 100 orang angkatan kerja di Maluku Utara, sekitar 31 orang diantaranya bekerja dengan jam kerja kurang dari 35 jam seminggu. Dari 31 orang tersebut, 9 orang diantaranya tergolong setengah penganggur, sedangkan 21 orang sisanya adalah pekerja paruh waktu. Dari jumlah tersebut, terlihat bahwa TPPW lebih tinggi nilainya dari TSP. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk bekerja

yang termasuk pekerja tidak penuh sudah merasa puas dengan kondisinya yang sekarang walaupun dengan produktivitas dan jam kerja yang rendah.

Tabel 4.1 juga menginformasikan komposisi TSP dan TPPW pada tingkat kabupaten/kota dengan pola yang hampir sama dengan kondisi di Provinsi Maluku Utara secara umum. Komposisi dimana proporsi TPPW lebih tinggi dibandingkan dengan TSP terjadi di semua kabupaten/kota di Maluku Utara.

Tabel 4.1. Tingkat Pekerja Tidak Penuh Menurut Kabupaten/Kota, 2017

| Kabupaten | TSP (%) | TPPW (%) | TPTP (%) |
|---------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Halmahera Barat | 10,54 | 26,81 | 37,34 |
| Halmahera Tengah | 12,88 | 26,88 | 39,76 |
| Kepulauan Sula | 14,82 | 20,82 | 35,65 |
| Halmahera Selatan | 9,98 | 19,95 | 29,93 |
| Halmahera Utara | 9,52 | 16,94 | 26,46 |
| Halmahera Timur | 9,03 | 18,81 | 27,84 |
| Pulau Morotai | 11,37 | 18,80 | 30,17 |
| Pulau Taliabu | 17,88 | 34,45 | 52,34 |
| Ternate | 4,59 | 15,97 | 20,56 |
| Tidore Kepulauan | 5,01 | 30,66 | 35,67 |
| Maluku Utara | 9,38 | 21,19 | 30,57 |

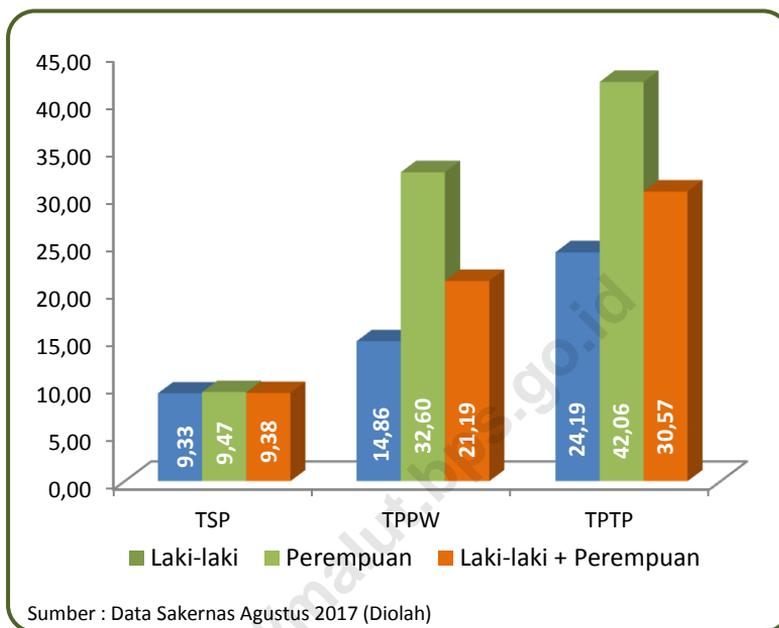
Sumber : Data Sakernas Agustus 2017 (Diolah)

Tingkat Pekerja Tidak Penuh tertinggi berada di Kabupaten Pulau Taliabu yang mencapai 52,34 persen, artinya lebih dari separuh dari total angkatan kerja yang bekerja mempunyai jam kerja dibawah jam kerja normal 35 jam per minggu. Sementara Kota Ternate memiliki Tingkat Pekerja Tidak Penuh yang paling rendah yaitu sebesar 20,56 persen, yang mengindikasikan angkatan kerja yang bekerja di Ternate sebagian besar mempunyai jam kerja lebih dari 35 jam per minggu.

4.2. Pekerja Tidak Penuh Menurut Jenis Kelamin

Menurut jenis kelamin, Tingkat Pekerja Tidak Penuh penduduk perempuan di Maluku Utara lebih tinggi dibanding laki-laki. Pada tahun 2017, TPTP perempuan tercatat sebesar 42,06 persen, hampir dua kali lipat dari TPTP

laki-laki yang sebesar 24,19 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar angkatan kerja perempuan di Maluku Utara yang bekerja mempunyai jam kerja di bawah jam kerja normal 35 jam per minggu.



Gambar 6. Tingkat Pekerja Tidak Penuh Menurut Jenis Kelamin, 2017

Tingginya TPT pada penduduk wanita banyak disumbang oleh TPPW yang mencapai 32,60 persen. Dapat dikatakan bahwa angkatan kerja perempuan yang bekerja di Maluku Utara sudah merasa puas dengan pekerjaannya saat ini walaupun dari sisi jam kerja tergolong di bawah jam kerja normal.

4.3. Pekerja Tidak Penuh Menurut Jenis Pendidikan

Jenjang pendidikan menjadi suatu hal yang penting terkait dengan status sosial ekonomi seseorang. Biasanya semakin tinggi latar belakang pendidikan seseorang pendapatan dari balas jasa atas pekerjaan yang dijalannya akan semakin layak. Dengan demikian produktivitas yang umumnya diukur melalui besar kecilnya pendapatan pekerja berkaitan erat dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

Tabel 4.2. Tingkat Pekerja Tidak Penuh Menurut Tingkat Pendidikan, 2017

| Tingkat Pendidikan | TSP (%) | TPPW (%) | TPTP (%) |
|---------------------|-------------|--------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Pendidikan Rendah | 10,07 | 25,14 | 35,21 |
| Pendidikan Menengah | 9,51 | 14,13 | 23,64 |
| Pendidikan Tinggi | 6,72 | 20,64 | 27,36 |
| Total | 9,38 | 21,19 | 30,57 |

Sumber : Data Sakernas Agustus 2017 (Diolah)

Pekerja tidak penuh di Maluku Utara terbanyak pada kelompok pendidikan dasar, yaitu 35,21 persen yang terdiri dari 25,14 persen pekerja paruh waktu dan 10,07 persen setengah penganggur. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena pekerja tidak penuh di Maluku Utara banyak berasal dari penduduk yang berpendidikan dasar. Kebutuhan untuk mendapatkan penghasilan, sementara kemampuan dan keahlian terbatas, membuat kelompok ini menerima pekerjaan seadanya meski dengan balas jasa yang terbatas.

BAB V

KESIMPULAN

Tidak dapat dimungkiri jika pengangguran masih menjadi persoalan penting yang harus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Sebagai provinsi muda, Maluku Utara mempunyai kelebihan dalam sumber daya alam dan sumber daya manusia. Struktur penduduk yang didominasi oleh umur muda bisa menjadi potensi yang efektif dalam mengembangkan perekonomian di Maluku Utara. Namun, kondisi tersebut bisa berlaku dengan catatan sumber daya manusia usia muda Maluku Utara mempunyai keahlian dan kemampuan yang mumpuni, disertai dengan penyaluran keahlian dan kemampuan tersebut pada lapangan kerja dan dunia usaha.

Secara umum, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Maluku Utara pada tahun 2017 tercatat sebesar 5,33 persen yang berarti dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 5 orang yang menganggur. Kota Ternate merupakan wilayah dengan TPT tertinggi di Maluku Utara, yaitu 7,71 persen. Sedangkan TPT terendah tercatat di Kabupaten Halmahera Barat, yaitu sebesar 2,19 persen.

Karakteristik pengangguran di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2017 diantaranya sebagai berikut:

- a. Penduduk perempuan menyumbang pengangguran 1,5 kali lebih banyak daripada penduduk laki-laki. TPT penduduk perempuan adalah sebesar 7,37 persen, sedangkan TPT penduduk laki-laki sebesar 4,20 persen.
- b. Menurut kategorinya, pengangguran di Maluku Utara didominasi oleh mereka yang mencari pekerjaan, yaitu sebesar 77,50 persen. Namun terdapat fenomena yang cukup miris, dimana terdapat sekitar 14,08 persen angkatan kerja yang menganggur karena putus asa atau merasa tidak mampu mendapatkan pekerjaan.

- c. Pengangguran di Maluku Utara kebanyakan berpendidikan menengah yang merupakan lulusan SMA Umum dan SMA Kejuruan. TPT pada kelompok ini mencapai 9,37 persen.
- d. Penduduk usia muda, terutama pada dua kelompok umur muda (15-19 tahun dan 20-24 tahun), tercatat memiliki TPT paling tinggi dibanding kelompok umur yang lain, yaitu 21,59 persen pada kelompok umur 15-19 tahun dan 20,03 persen pada kelompok umur 20-24 tahun.
- e. Pengangguran di wilayah perkotaan lebih besar daripada di perdesaan. TPT perkotaan tercatat sebesar 7,22 persen, sedangkan TPT perdesaan sebesar 4,57 persen.

Berdasarkan ulasan tersebut, perlu digaris bawahi bahwa kondisi umum pengangguran di Maluku Utara didominasi oleh penduduk muda dan kaum terdidik. Selain faktor keterbatasan lapangan pekerjaan yang tersedia, harus disadari juga bahwa ada kecenderungan pengangguran di Maluku Utara memilih-milih pekerjaan, khususnya pada kelompok berpendidikan tinggi. Keinginan dan kemampuan untuk berwirausaha juga masih sangat minim. Perlu campur tangan pemerintah daerah dalam hal ini, khususnya dalam mengadakan kegiatan pelatihan atau pembinaan wirausaha untuk generasi muda.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI MALUKU UTARA**

Jl. Stadion No. 65, Ternate - 97712

Telp : (0921) 3127878, Fax : (0921) 3126301

Homepage : <http://malut.bps.go.id> E-mail : bps8200@bps.go.id